

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifindan Firmansyah dkk, 2005. *lembaganegara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Charles Simabura, 2011. *Parlemen Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

C.S.T Kansil, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Feri Amsari, 2011. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir dkk, 2009. *kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

-----, 2014. *Perihal Undang-Undan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Khairul Fahmi, 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Krisna Harahap, 2009. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, PT Grafitri Budi Utami, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid II*.

Makhamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kapinetaraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pataniari Siahaan, 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta.

Saldi Isra, 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Zainal Asdikin dan Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Zulkifly Hamid, 2011. *pengantarilmupolitik*. PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

C. Putusan

Putusan MK 76/PUU-XII/2014 pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal dan Website

Annisa Fioni, 2018. *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Akhmad Aulawi, 2015. *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara, rechts vinding* online jurnal.

IlhamdiTaufik, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Keberadaan Organisasi Advokat Di Indonesia*, Hasil Penelitian Hukum Tata Negara UNAND, 15 Juli 2015.

Kerjasama KPK, MK, MPR, USU, dan PUSAKO fakultashukum UNAND, *Hak Imunitas Bagi Pejabat Publik*, Term Of Reference Focus Group Discussion (FGD), Padang 25 April 2018.

Mohammad Muniri, 2017. *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI berdasarkan UU No 17 Tahun 2014*, jurnal Yustitia Vol.18 No. 1 Mei 2017.

Nurul Faristin Hesti Febrianty, 2016, *Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam*.

Wenly.R.J.Lolong, 2015, *problematika imunitas hukum anggota parlemen ditinjau dari prinsip equality before the law*, Al Ahkam jurnal, Vol.V No 2, Desember 2015.

<http://digilib.uinsby.ac.id/12029/4/bab%203.pdf>.

<https://visiuniversal.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-dan-istilah-konstitusi.html>.

<http://www.gurupendidikan.co.id/konstitusi-tertulis-tidak-tertulis-pengertian-fungsi-kelebihan>.

<https://www.google.co.id/amp/s/amaliasturina.wordpress.com/2013/05/24/konstitusi-dengank-konstitusionalisme/amp/>.

<https://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-43397697>.

<https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara-soroti-revisi-uu-md3-soal-pemanggilan-paksa-cEuQ>.

Koran Tempo 29 Juni 2018.

Koran Kompas 29 Juni 2018.

Koran Kompas 12 Juli 2018.

